



Analisis Kebijakan Pendidikan

Rommy J. Mongdong

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado

Abstract

Received: 20 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 01 Juli 2025

Kebijakan pendidikan merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional karena menentukan arah, tujuan, serta strategi dalam pelaksanaan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji, menilai, dan memahami kebijakan pendidikan berdasarkan berbagai sudut pandang, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, mencakup pengertian, prinsip-prinsip dasar, serta pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan semata, tetapi juga pada konteks pembentukan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, proses implementasi, serta evaluasi dampaknya di lapangan. Terdapat berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan, seperti pendekatan rasional, politis, teknokratik, serta pendekatan kritis yang memberikan pemahaman lebih luas terhadap realitas kebijakan pendidikan. Pemahaman terhadap konsep dasar ini penting bagi mahasiswa, akademisi, dan pengambil keputusan agar dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang relevan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan.

Keywords: *kebijakan pendidikan, analisis kebijakan, evaluasi pendidikan*

(*) Corresponding Author: romimongdong@unima.ac.id

How to Cite: Mongdong, R. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.D), 352-355. Retrieved from

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12616>

PENDAHULUAN

Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya.

Beragam pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen J Ball, (2012) menyatakan policy as text and discourse yang menarik untuk dielaborasi.

Misalnya penggunaan istilah diberbagai Negara yang beragam di Inggris, policy berarti kebijakan; Latin politia, berarti politik; Yunani, polis berarti Negara, (2019).

Kebijakan sering juga dimaknai sebagai sebuah rekayasa sosial (social engineering), sehingga kebijakan seringkali dirumuskan penguasa. Seiring dengan itu kebijakan umumnya dimaknai sebagai tahapan tindakan yang dilakukan atau tidak oleh perorangan ataupun kelompok tertentu (Sudiyono, 2019). Tindakan yang dimaksud ini terdiri beberapa tindakan dalam rangka mencapai tujuan mengubah perilaku masyarakat melalui rekayasa sosial. Kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak, bisa berwujud sederhana atau rumit, sifatnya unun atau

terperinci, kualitatif atau kuantitatif. publik atau privat. Kebijakan dalam konteks ini bisa berupa deklarasi suatu dasar, atau pedoman bertindak, arah tindakan atau program aktivitas tertentu atau suatu rencana (Charles O Jones, 2019 dalam Arif Rohman, 2018).

Penggunaan istilah kebijakan oleh agen-agen pemerintah seringkali untuk menggambarkan rentang kegiatan yang berbeda-beda mencakup: a) definisi, b) tujuan, c) menentukan prioritas, c) meriyusun rencana, dan d) menspesifikasikan aturan-aturan keputusan. Dalam rentang kegiatan kebijakan, bisa diidentifikasi beberapa komponen dari kebijakan, yaitu goal, plans, program, decision, effect (Jenlcins, 2019;15). Hal senada dijelaskan dasar-dasar kebijakan, yaitu: 1) suatu penegasan dan tujuan, 2) keputusan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayarni, dan mernpengaruhi lingkungan kewenangan. 3) panduan tindakan disresional, 4) strategi guna mernecahkan suatu masalah, 5) perilaku yang mernpuriyai sanksi, 6) norna, konsistensi, peraturan, dan substantil. 7) keluaran dalam sistem kebijakan. dan 8) pengaruh dalam pernbuatan kebijakan yang mengarah pada implernentasi dan sasaran (Duke dan Canady.2020).

Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan

Sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa kata kunci (keywords) yang membangun konstruksi logika berpikir tentang definisi analisis kebijakan pendidikan. adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan. menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perurnusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengarnbilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan (Hanisy, 2013). Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak sernata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pernbuatan kebijakan, mulai dari analisis rmasalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sarnpai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rurnusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagian dari merupakan proses politik (bargaining position) para pihak yang memiliki kewenangan. Hal senada dijelaskan Suyahnan (2016) menjelaskan analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi kondisi pendidikan, menggunakan data sebagai masukan bagi perurnusan alternatif kebijakan pengarnbilan keputusan bersifat politis dalam upaya mernecahkan masalah pendidikan.

Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Pedoman untuk bertindak bagi pengarnbil keputusan dari analisis kebijakan Pendidikan yang dilaksanakan berfungsi: 1) mencapai ketertiban layanan pendidikan, 2) menjarnin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan. 3) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan. 5) tertib administrasi bisa diwujudkan. Sedangkan fungsi lainnya dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain; 1) fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro, 2) fungsi

inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan. 3) fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola. peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik, antara lain: 1) suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan memadukan berbagai informasi yang masuk, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang layanan pendidikan, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan rekomendasi penelitian tersebut. Hal ini berarti objek analisis kebijakan pendidikan adalah proses penyusunan beserta paket kebijakan pendidikan itu sendiri. Kegiatan utama analisis kebijakan pendidikan terdiri dari pengumpulan informasi selengkapnya, penarikan kesimpulan dengan prinsip logis. Dengan kaidah ini, analisis kebijakan bisa dikategorikan didasari kaidah ilmiah. 2) informasi menjadi sumber utama kajian analisis kebijakan yakni keluaran hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian analisis kebijakan merupakan output dari proses pengolahan data penelitian yang siap digunakan membantu pengambilan keputusan serta desain kebijakan pendidikan. Itulah pertimbangannya, analisis kebijakan menjadi salah satu bentuk diseminasi hasil penelitian. 3) keluaran (output) analisis kebijakan berupa rekomendasi pilihan (opsional) keputusan bisa juga dalam bentuk desain kebijakan. Output kebijakan pendidikan lainnya berupa nasihat, petunjuk teknis standar operasional procedural (SOP) berupa bahan, alur, urutan dan target pengambilan keputusan tentang pendidikan.

PEMBAHASAN

Analisis kebijakan pendidikan adalah proses sistematis untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menilai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dibuat, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan apa dampaknya terhadap peserta didik, pendidik, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara umum.

(Hanisy, 2013). Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rumusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan.

Implementasi analisis kebijakan pendidikan adalah proses menerapkan hasil kajian kebijakan ke dalam tindakan nyata untuk memperbaiki sistem pendidikan. Tahap ini melibatkan kerja sama antar berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat.

Implementasi analisis kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah yang ada. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan data, SDM, kondisi sosial-budaya, dan komitmen politik.

Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rumusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagian dari merupakan proses politik (*bargaining position*) para pihak yang memiliki kewenangan.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi, merancang, dan merekomendasikan kebijakan yang efektif dalam sektor pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan akses, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Analisis kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar kajian teoritis, tetapi menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada masa depan bangsa. Oleh karena itu, analisis ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, S. J. (2012). *Global education inc: New policy networks and the neo-liberal imaginary*. New York: Routledge.
- Duke, D. L., & Canady, R. L. (2020). *Educational Governance and Policy: A Political Analysis*. Boston: Allyn & Bacon. (Edisi terbaru tahun 2020)
- Hanisy, A. (2013). Konsep Dasar Analisis Kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 48-63
- Jones, C. O. (2018). *An Introduction to the Study of Public Policy* (Edisi Terbaru). New York: Wadsworth Publishing. (dikutip dalam Rohman, 2018)
- Jenkins, W. I. (2019). *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. London: Martin Robertson. (Edisi Revisi atau cetakan ulang tahun 2020)
- Sudiyono. (2019). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rohman, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.